ABSTRAK

Program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat miskin adalah strategi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mewujudkan rumah sehat sejahtera, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan sebagai payung hukum guna menaungi program yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016. Berdasarkan kebijakan tersebut penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN”**

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah di Kecamatan Kundur dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan program tersebut.

 Pengamatan ini menggunakan metode pengamatan Kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengamatan ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen dengan informan para pejabat dan masyarakat terkait dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat terkait dalam pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

 Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun sudah terealisasi namun masih terdapat sebagian kecil yang belum terlaksana. Dikarenakan terdapat kendala dan hambatan seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi dari pihak yang berperan, tidak dilaksanakannya cek ulang dan monitoring terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan.

 Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut, penulis mengusulkan kepada pemerintah agar program bantuan stimulan perumahan swadaya selanjutnya menyerahkan sistem pelaksanaannya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilimpahkan kepada kecamatan yang mendapat bantuan tersebut. Serta diharapkan program bantuan stimulan perumahan swadaya dapat bersinergi dengan program dari Pemerintah Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pihak swasta serta pihak lainnya yang mencanangkan program serupa program bantuan stimulan perumahan swadaya agar tidak terjadi tumpang tindih antara program satu dengan lainnya. Setelah dilimpahkannya program tersebut pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pelaksanaannya akan lebih mudah dan meminimalkan pelaksana kebijakan yang kurang memahami program ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Stimulan

 *ABSTRACT*

*Stimulant assistance of self-help housing program given to poor people is strategies for fulfillmenting of basic needs as well as for implementing the healthy and prosperous housing encompassing the program, referred to the Minister for Public Works and Public Housing Regulation No.* 13/PRT/M/2016*. Under the regulation , the author focuses on a research entitled* ***“THE POLICY IMPLEMENTATION OF STIMULANT ASSISTANCE OF SELF-HELF HOUSING PROGRAM FOR FULFILLMENT OF BASIC NEEDS IN ALAS SUB-DISTRICT KARIMUN DISTRICT KUNDUR”***

*The purpose of this observation is to know stimulant assistance of self-help housing program for low-income people in Kundur Sub-District and to identify the supporting and inhibiting factors of the implementation of the program’s policy.*

*The observation conducted in this study used Kualitatif observation combined with inductive approach. In this study, the author collected the data through interviews, observation and document review obtained from some informants and public officials involved in the program’s implementation in Sub-District Alas, Sumbawa.*

*The results of this study show that the stimulant assistance of self-help housing program in Sub-District Kundur, Karimun, has been implemented, but has not completely run in accordance with the generated policies. Because of some obstacles and barriers such as lack of funds and lack of coordination of the people involved, re-checking and monitoring are not conducted to the people who received the assistance.*

*To overcome the problems of the program’s implementation, the author suggests to the government that the subsequent stimulant assistance of housing programs should hand over it implementation system, to the Public Housing Agencies And Residential Areas who have been delegated to the districts that received the assistance. It is also expected that the stimulant assistance of self-help housing program can work in synergy with the Central Government’s programs, the Minister for Public Works and Public Housing, private parties and other parties who launched a program exactly like the stimulant assistance of self-help housing program, in order to avoid the possible overlap between one programs to another. After the program was disbursed to the Public Housing and Residential Areas, the implementation will be easier and minimize the implementation of policies that are less understanding of this program.*

*Key Word : Implementation, Policy, Help stimulant*